

Soal Ikut Campur U

DENGAN MENGGUNAKAN KEKERASAN BERSENJATA, Perdana Menteri Kedua Kamboja, Hun Sen, untuk sementara berhasil menguasai pemerintahan di negeri itu. Perdana Menteri Pertama Norodom Ranariddh yang ditaklukkannya menggambarkan tindakan Hun Sen sebagai sebuah kudeta yang harus dilawan tuntas, kalau bisa, dengan bantuan diplomasi dan masyarakat internasional. Kalau tidak, ya, dengan konfrontasi, termasuk kekerasan tandingan. Ada kabar, Ranariddh telah mengirim surat ke Taiwan, minta bantuan senjata.

Kasus di Kamboja melontarkan sekali lagi sebuah pertanyaan universal: benarkah kekerasan berdarah merupakan cara paling manjur—kalau bukan satu-satunya cara manjur—dan sekaligus cara yang paling umum dipakai manusia untuk menyelesaikan sebuah sengketa, atau menggapai kekuasaan. Ilmuwan Prancis, Ernest Renan, mungkin sekali akan menjawab pertanyaan itu dengan "ya", betapapun sedihnya jawaban itu harus diberikan. Dan, ia bukan satu-satunya ilmuwan yang berpandangan demikian.

Yang jelas, sejarah dunia mengenal jayanya kelas samurai, ksatria, dan rezim-rezim birokrat militer di sejumlah kawasan di dunia. Itu pula sebabnya pabrik senjata—yang produknya hanya bagus bila mampu melukai, menyiksa, atau membinasakan manusia sekaligus—menjadi salah satu industri besar dan sumber nafkah banyak manusia lain.

Kekerasan berdarah memang sering dicaci dan dikutuk di mana-mana. Makian itu bukan monopoli warga sipil. Tak kurang-kurangnya pejabat militer juga menentang digunakannya cara-cara kekerasan untuk menyelesaikan sengketa sosial atau politik. Tapi, itu di lingkup kata-kata.

Dalam praktiknya, kekerasan dipakai oleh berbagai pihak bukan sekadar untuk menyelesaikan masalah atau menggapai kekuasaan yang lalim. Bukan hanya oleh kaum primitif atau tentara, melainkan hampir semua warga dunia. Dari hansip, anak remaja, suporter sepak bola, sopir bus, preman, hingga para ayah dan suami. Bahkan, yang sangat ironis, menurut pengamatan Renan hampir 100 tahun lalu, kekerasan ternyata merupakan landasan utama terbinanya kesatuan dan persatuan masyarakat di berbagai tempat di dunia. Juga, dalam lingkup nasional.

Pengamatan universal yang sangat menyedihkan itu mendapatkan sejumlah pembuktian dari sejarah berbagai masyarakat di kawasan kita sendiri. Kekerasan merupakan bagian yang mahapenting dalam seluruh sejarah bangsa negara di Asia Tenggara, baik secara keseluruhan sebagai sebuah kawasan regional, maupun secara individual sebagai kumpulan sejumlah bangsa-negara.

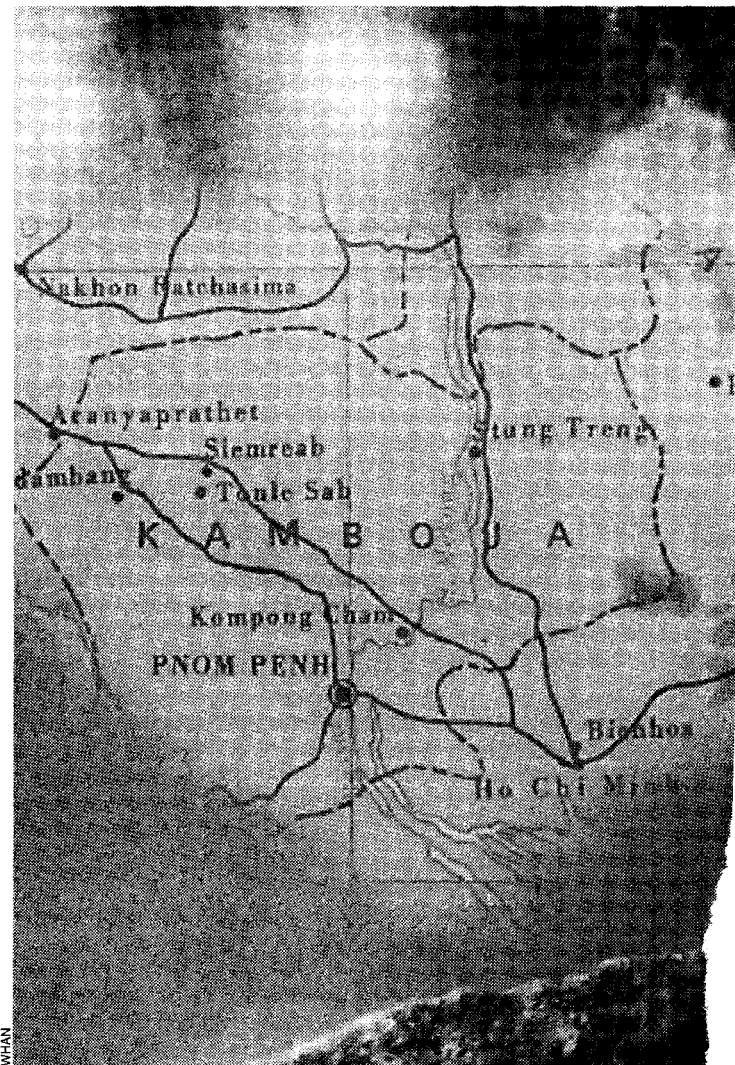
Tanpa kekuatan perang, tak ada ekspansi kolonial Eropa yang mewarnai seluruh peradaban dunia 300 tahun paling belakang. Tanpa kekerasan, tak ada yang dinamakan Asia Tenggara. Tanpa kekerasan, tak ada Indonesia, Hindia Belanda, atau Orde Baru. Kekuatan militerlah, khususnya dari Amerika Serikat di sekitar Perang Dunia II, yang membentuk geografi Asia Tenggara, terdiri dari 10 negara yang semula hendak dipersatukan dalam ASEAN minggu depan.

Kekerasan politiklah yang membentuk tiap-tiap bangsa-negara di kawasan itu lewat sejarah kolonial (kecuali Thailand). Bukan hanya di Myanmar (di bawah rezim junta militer, SLORC)

kekerasan telah membina terbentuknya berbagai pemerintah di Asia melewati pertikaian berdarah di antara saudara sebangsa-setanah air. Dalam dua dasawarsa ini, kawasan Asia Tenggara disebut sebagai "keajaiban Asia" berkat pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan. Hal ini sedikit banyak dicapai lewat program stabilitas politik yang seringkali berarti suksesnya kekerasan digunakan untuk menindas lawan politik oleh yang berkuasa.

Perkecualian tentu saja ada. Orang-orang seperti Ramos-Horta, Aung San Suu Kyi, Soekarno-Hatta, Megawati Soekarnoputri, Budiman Soedjatmiko, Sri-Bintang Pamungkas, atau Mohandas Gandhi adalah sebagian kecil dari mereka yang percaya bahwa politik dapat diperjuangkan dengan cara-cara nonkekerasan. Tentu saja, masih banyak perjuangan nonkekerasan lainnya. Tapi, itulah sebagian dari mereka yang bukan hanya berjuang, melainkan juga mencapai hasil perjuangan yang sulit diabaikan sejarah.

Persoalannya, walaupun benar bahwa "pada akhirnya" sejarah



urusan Kamboja Itu



Ariel Heryanto*)

manusia adalah sejarah adu otot seperti perikehidupan dinosaurus, apakah ini merupakan sebuah hukum sejarah? Apakah ini sesuatu yang harus diterima apa adanya, dengan terpaksa, sedih atau malu? Ataupun ini sekadar sebuah pengakuan atas realitas sejarah yang selanjutnya harus dilawan, dan bukan sekadar disembah atau dilestarikan? Persoalannya, kalau benar kekerasan telah menjadi panglima dalam kehidupan umat manusia, apakah sikap kita terhadapnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu tak hanya keluar dari medan pertempuran di Kamboja. Tidak hanya tertuju kepada Dewan Keamanan PBB atau sidang menteri negara-negara ASEAN. Ia menjadi pertanyaan universal untuk kita semua. Sebab, kekerasan tampil dan beranak-pinak secara cepat di berbagai tempat dalam kehidupan sehari-hari orang biasa juga.

Bagaimana dan haruskah kita bersikap terhadap merajalelanya praktik kekerasan sebagai alat untuk mencapai tujuan? Dalam

wacana mutakhir, pertanyaan itu muncul dalam beberapa rumusan berbeda. Misalnya, ada yang mempertanyakan, tidakkah seharusnya kita punya kepedulian kepada masalah-masalah hak asasi, diskriminasi terhadap kelompok rentan (anak-anak, lanjut usia), minoritas, perempuan, dan sebagainya? Ada pihak lain yang merumuskan secara negatif apakah pantas kita "ikut-campur" urusan orang yang menggunakan kekerasan terhadap sesamanya, padahal mereka bukan orang dari suku kita sendiri, dan kelompok agama kita sendiri, atau dari sesama warga bangsa sendiri? Yang satu berpikir universalis (kemanusiaan), yang lain isolasionis/sektarian/primordial.

Di sini krisis Kamboja memaksa elite politik ASEAN menghadapi ujian yang menyulitkan dan bisa memalukan. Ranariddh menyerukan masyarakat internasional, khususnya Amerika Serikat dan ASEAN, agar ikut menekan Hun Sen dan membantu memecahkan persoalan di Kamboja secara diplomatis. Sebaliknya, Hun Sen mengancam masyarakat internasional untuk tidak "ikut campur" urusan dalam negeri Kamboja. Teguran ini juga ditujukan kepada ASEAN yang justru menjadi pelopor utama kebijakan "jangan ikut campur" karena seringnya menghadapi gugatan masyarakat internasional dalam pelanggaran hak-hak asasi.

Seandainya krisis Kamboja akan berlarut-larut, apakah ASEAN akan mengkhianati propagandanya sendiri untuk tidak saling ikut campur urusan dalam negeri orang lain? Pantas diingat persetujuan damai antara pemerintah Ramos dan perjuangan bangsa Moro di Mindanao tercapai berkat campur tangan ASEAN, khususnya Indonesia. Kalau ASEAN berniat baik untuk membantu memecahkan krisis di Kamboja, mereka harus mencari istilah lain, menggantikan istilah ikut campur, agar menyelamatkan muka sendiri.

Ataukah ASEAN akan bertindak lebih pragmatis: menerima Hun Sen sebagai wakil pimpinan politik Kamboja. Bukan karena ASEAN tidak mengakui adanya krisis di negeri itu, melainkan bisa saja ASEAN memilih untuk tidak mempersoalkan krisis itu dengan alasan itu urusan orang Kamboja sendiri—dan ASEAN tak usah ikut campur. Terlepas dari bagaimana Hun Sen menggunakan kekerasan untuk menduduki puncak kekuasaan, faktanya, dialah orang yang sedang berkuasa.

Dengan logika demikian, ASEAN telah merangkul junta militer SLORC di Myanmar untuk menjadi bagian dari perhimpunan regional itu. Di Australia, pemerintah menggunakan logika demikian untuk menghadapi warganya yang menggugat kedaulatan Indonesia atas Timor Timur. Di dalam politik dalam negeri di Indonesia, logika yang sama diberlakukan terhadap kasus PDI.

Seperti korupsi, kekerasan berdarah sering dikutuk dengan kata-kata oleh banyak pihak. Namun, sekaligus sering dipraktikkan sebagai cara untuk mencapai kekuasaan. Secara fakta-empiris, analisis sosiologi boleh menunjukkan demikian. Masalahnya, bagaimana secara etika dan moral, hal-hal itu harus dihadapi bila kita memang ingin berbeda dari dinosaurus. Bukan saja karena manusia bisa bikin film tentang dinosaurus dan dinosaurus tidak bikin film tentang kita.

*Antopolog Sosial.

